

**SEJARAH IDEOLOGI NASIONALISME GP ANSOR DALAM
MENGAWAL KEUTUHAN NKRI**

**STUDI KASUS: DINAMIKA INTERNAL GP ANSOR DALAM
MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN**

(1967-2000)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)



Oleh:

INTAN BUDIMAN

NIM: A72213122

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini, Saya:

Nama : Intan Budiman.

NIM : A72213122.

Fakultas : Fakultas Adab dan Humaniora.

Judul : Sejarah Ideologi Nasionalisme GP Ansor dalam Mengawal Keutuhan NKRI Studi Kasus: Dinamika Internal GP Ansor dalam Membangun Semangat Kebangsaan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujukan sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan karya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 03 Januari 2020

Saya Yang Menyatakan



Intan Budiman

NIM:A72213122

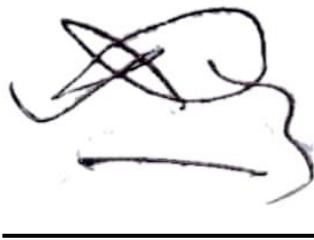
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Di Setujui Pada Tanggal

03 Januari 2020

Oleh

Pembimbing



Drs. H. Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 195509041985031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah di uji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus

Pada Tanggal 12 Maret 2020

Ketua/Pembimbing



Dr. H. Abdul Aziz Medan, M.Ag.

NIP. 1955090419850311001

Penguji 1



Dr. H. M. Khodafi, M.Si.

NIP. 197211292000031001

Penguji 2



Dr. H. M. Ridwan, M.Ag.

NIP. 195907171987031001

Sekretaris



Moh. Atikurrahman, M.A.

NIP. 198510072019031004

Mengetahui Dekan Fakultas Adab dan Humaniora



Dr. Aditoni, M.Ag

NIP. 0021992031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Budiman
NIM : A72213122
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)
E-mail address : budimandfatih2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sejarah dan Ideologi Nasionalisme GP Ansor Dalam Mengawal
Keutuhan NKRI. Studi Kasus : Dinamika Internal GP
Anzor Dalam Membangun Semangat Kebangsaan. (1967-2000)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2020

Penulis

(Intan Budiman)
nama terang dan tanda tangan

mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih, 2) Menegakan ajaran islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menempuh Manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia, 3) Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang di ridhoi Allah SWT. Organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bersifat kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan yang berwatak kerakyatan dengan kedaulatannya berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kongres. Untuk mencapai tujuan, organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) berusaha: 1) Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan memperjuangkan pengamalan ajaran islam Ahlussunnah wal jama'ah. 2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional, 3) Meningkatkan Kesadaran dan Aktualisasi masyarakat sebagai upaya peningkatan Kualitas Kesehatan, Ketahanan Jasmani dan Mental Spiritual serta meningkatkan Apresiasi terhadap Seni dan Budaya Bangsa yang Positif serta tidak Bertentangan dengan Syari'at Islam, 4) Meningkatkan Hubungan dan Kerjasama dengan berbagai Organisasi Keagamaan, Kebangsaan, Kemasyarakatan,

Dasawarsa terakhir masa kekuasaannya Orde Baru menunjukkan kecenderungan yang lebih Akomodatif terhadap Kelompok Islam, Pemerintah lebih lunak terhadap Islam. hal ini ditunjukkan terhadap adanya pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Pada tahun 1990, pembolehan menggunakan Jilbab bagi Murid-murid di luar sekolah, pendampingan Pendirian Bank Syariah hingga naik hajinya Presiden Soeharto pada tahun 1991, pada saat bersamaan Presiden Soeharto mulai menjaga jarak dari Orang-orang terdekatnya dari kalangan Abangan ataupun Kristen. Sejarah mencatat rezim kuat yang menguasai Tiga Dasawarsa tersebut mulai guncang, Krisis Ekonomi pada Tahun 1998 yang di ikuti gejolak Sosial yang begitu hebat menjadi pukulan yang akhirnya menumbangkan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berbagai aksi demonstrasi dan kerusuhan dari berbagai daerah. Dalam carut marut itulah NU tampil sebagai jangkar Politik yang membantu Bangsa Indonesia mengarungi dahsyatnya Badai Perubahan babak baru Bangsa Indonesia serta GP Ansor sebagai sayap Kepemudaannya mulai menunjukkan kembali kebangkitan sebagai Organisasi terbesar di Indonesia.

Selesainya Rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 menjadi titik awal dari Sistem Demokrasi kebebasan dalam memilih dan di pilih, kebebasan berorganisasi serta berekspresi. Hal ini di wujudkan dengan banyaknya Partai-partai yang muncul kepermukaan dengan beragam Ideologi, surat kabar bahkan ribuan Organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada berbagai bidang kehidupan. Pada sisi lain Demokrasi pasca Orde Baru menjadi suatu

kemerdekaan bagi rakyat Indonesia sendiri yaitu menjadi jaminan kebebasan berpolitik. Namun di sisi lain hal ini di barengi oleh politik elektoral yang keras baik pada tingkat elit maupun massa yang dalam beberapa kasus berakhir dengan bentrokan fisik antar massa pendukung, massa pendukung dengan aparat keamanan. Berkembang pula apa yang disebut politik Identitas. Hal ini tercerminkan dalam orientasi keagamaan yang intoleran terhadap perbedaan, ekstrem, bahkan dalam beberapa kasus terjadi tindakan teror, kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, lapangan pekerjaan adalah menjadi isu yang belum sepenuhnya dapat di selesaikan.

GP Ansor dalam hal ini pada era pasca Orde Baru hidup seperti keadaan di atas, terlebih seperti isu-isu Intoleransi, Radikalisme, dan terorisme. GP Ansor dengan pendiriannya yaitu mempertahankan NKRI dari berbagai paham ekstrem dan mempertahankan Ideologi Bangsa Indonesia dengan Pancasila.

Dengan adanya sistem Demokrasi membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang menafsirkan Sistem Demokrasi adalah kebebasan ber ideology ekstrem yang memanfaatkan celah terjadi kerusuhan antar kelompok berbagai lokasi di tanah air, selain itu krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kondisi seperti ini mendorong Kelompok-kelompok ekstrim yaitu kelompok Islam Radikal untuk memperjuangkan kembali obsesi mereka dengan mengganti Ideologi Pancasila karena di anggap gagal dalam membawa ke arah yang lebih baik. Bagi pandangan mereka Islam adalah solusi dari segala masalah yang sudah ada. Dengan demikian, hal ini menjadi nostalgia bagi Kelompok-kelompok Islam radikal ingin mendirikan Negara Islam dan Khilafahnya.

awal masa Orde Baru sampai Masuk Awal masa Reformasi belum pernah ada yang meneliti dinamika internal di masa Orde Baru Hingga perubahan Asas yang awalnya ahlusunnah wal jamaah menjadi Asas Tunggal Pancasila sebagai bentuk nyata dari rasa Nasionalisme GP Ansor. Akan tetapi peneliti membutuhkan penelitian terdahulu untuk menjadikan acuan dalam penulisan skripsi. Beberapa Penelitian yang mirip dengan topik penulis yaitu:

1. Hadi Supriyanto, Peranan Pemuda Ansor dalam upaya memelihara kesatuan Bangsa di Surabaya 1995-2005. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005. Skripsi ini menitik beratkan Pembahasan pada Peran GP Ansor dalam memelihara hubungan baik dengan agama-agama selain Islam dalam rangka menjadi Kesatuan Bangsa.
2. Fuzan, Peran GP Ansor dalam Menjaga Keutuhan NKRI: Studi Historis Perlawanan dan Penumpasan G30 S/PKI di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban 1967-1968. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya 2015. Skripsi ini menitik beratkan pada peristiwa Peran GP Ansor dalam Penumpasan PKI di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Penelitian diatas, fokus Pembahasannya berbeda dengan Pembahasan Penelitian ini karena, yang pertama fokus Pembahasannya adalah Pertama Bagaimana Ideologi Nasionalisme GP Ansor sedangkan Kedua, Fokus Eksistensi GP Ansor dalam Membangun Semangat Kebangsaan.

3. Aderika, Peran GP Ansor dalam Menumpas PKI di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penelitian di atas menitik beratkan peran GP Ansor Pada Masa pergolakan Terhadap kelompok PKI yang terjadi di desa Kanor.;

menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama' (PNU), Pada tanggal 24 april tahun 1934 Organisasi ini berubah menjadi Ansor Nadlatul Oelama (ANO). Organisasi Ansor Oelama (ANO) inilah menjadi cikal bakal berdirinya GP Ansor 14 desember 1949 sampai hingga sekarang yang menjadi wadah Pemuda Nahdlatul Ulama dan menjadi peran dalam membela Ideologi Negara.

E. Hubungan Gerakan Pemuda Ansor dengan NU

Walaupun ANO sudah terbentuk dan sudah di nyatakan sebagai bagian dari NU, Organisasi ini belum di akui secara formal karena belum ada pengesahan dalam hitam di atas putih Hubungan GP Ansor hanya sebatas hubungan pribadi antar tokoh seperti KH Wahab Chasbullah dengan NU. Ketika Muktamar ke IX di Banyuwangi tepat pada tanggal 21-26 April 1934 ANO di sahkan bagian dari Dapertemen Pemuda NU. Penerimaan dan pengesahan ANO sebagai wadah dari Pemuda NU, setelah Muktamar di Banyuwangi Tokoh-tokoh ANO seperti Abdullah Ubaid, Thohir Bakri, Abdurohim, Sholeh dan Alwi bin Abdul aziz mengadakan pertemuan dalam menindak lanjuti rancangan Rumah tangga ANO serta membahas pelebaran sayap di Daerah-daerah lainnya. Dalam rapat tersebut mereka di dampingi oleh Kiai muda yang mulai tampil dalam pengurusan PBNU seperti KH. Machfud Shidiq, KH. Moch.Nor, KH. Dahlan Kertosono dan KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai pelindung. Pertemuan itu menghasilkan keputusan segera mendirikan cabang ANO. di antara Cabang NU yang mengizinkan berdirinya ANO adalah Surabaya.Cabang Pasuruan dan Cabang Gresik. Namun demikian ANO belum di atur secara rapi karena belum ada aturan

3. Pembangunan jangka panjang akan di tandai adanya regenerasi Bangsa di semua bidang kehidupan yang memerlukan mekanisme konstitusional.
4. Partisipasi murni dapat diwujudkan dan dikembangkan apabila rakyat secara sosial, politik, dan ekonomi telah kuat, sehingga kesenjangan di berbagai bidang dapat teratasi.
5. Dengan demikian harus ditumbuhkan budaya dan cara pandang yang baru terhadap pembangunan di kalangan masyarakat, dengan meletakkan asas keterkaitan dan kekinian (kontekstual). Asas keberlangsungan dan jangka panjang (sustainability), dan asas akhlak serta moral agama (religiositas), secara konsisten bagi terwujudnya masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan.
6. Harus di orientasikan pada pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia yang cerdas, profesional, dan beriman. Sehingga dapat melahirkan generasi baru yang mampu mengambil peranan selaras dengan kemajuan Bangsa.
7. Demokrasi terbuka yang pada hakikatnya merupakan pengakuan atas ketransparanan dan kebhinekaan masyarakat BangsaIndonesia serta penghargaan hak-hak rakyat yang mengejawantahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan berNegara. Pengembangan Demokrasi di Indonesia pada hakikatnya adalah mengembangkan hak dan kewajiban rakyat dalam mengimplementasikan pandangan hidup dan falsafah Bangsa (pancasila) melalui proses pembudayaan nilai-nilai Demokrasi serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga Demokrasi.

masyarakat, pada 24 april 1964 di Jakarta, Ansor membentuk Barisan Ansor Serba Guna sebagai kesatuan paramiliter, pendirian ini pula di dukung penuh oleh Militer. Aksi-aksi PKI yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat dilihat dari isu lahan dan kesenian/kebudayaan yang sering kali membuat ludruk, dalam hal ini Lekra yang di backup PKI sering melecehkan keyakinan umat Islam, misalnya melalui “Genjer-genjer” yang di nyanyikan sedemikian rupa dan Ludruk bertajuk “Gusti Allah Mantu” serta “Lahire Gusti Allah”. Di posisi ini Ansor tidak dapat membubarkan pementasan ludruk tersebut karena berpotensi di tangkap dengan tuduhan subversif dan memecah belah Nasakom, sehingga yang di lakukan dari Ansor adalah menyabotase pementasan ludruk Lekra, dalam beberapa kasus sering kali terjadi bentrok fisik tak terhindarkan.

Dengan berbagai provokasi yang di lakukan PKI membulatkan tekad Ansor dan NU sebagai induknya, untuk melawan PKI melalui aspek. Dalam aspek Politik, partai NU melakukan pendekatan kepada Soekarno yang pada dasarnya telah memiliki kedekatan sejak sebelum kemerdekaan. Kedekatan ini juga di tunjukan ketika pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, NU tetap setia kepada Soekarno. Demikian pula ketika pemberontakan DI/TII pecah, NU tetap mendukung Soekarno bahkan sempat memberikan gelar *Waliyyul Amri Dlaruri Bisysyaukati*. Dukungan politik NU terhadap Soekarno juga diberikan sepanjang pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. KH. Abdullah Wahab Chasbullah tokoh NU sekaligus anggota DPA, menyarankan kepada Soekarno untuk menjalankan Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Tangan Belanda.

memprotes pembahasan pokok-pokok tersebut dengan melakukan walk out. Meskipun pada akhirnya Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN menyebutkan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak merupakan agama. Namun menurut KH.Syansuri Bisri memandang masuknya pokok-pokok pembahasan tersebut dalam GBHN sudah merupakan ancaman terhadap status Islam sebagai agama. Dalam aksi walk out ini mendapatkan intervensi dari pemerintah Orde Baru, pemerintah memberhentikan ketua umum DPP PPP H.M.S. Mintaredja.

Setelah mengalami kekecewaan politik, NU akhirnya menggagas kembalinya NU ke Khittah 1926 sebagai Organisasi keagamaan. Namun, hal ini hanya berhasil pada tingkatan konsep, tapi gagal secara oprasional. Ini di karenakan semangat politik yang masih sangat kuat, selain tumpang tindih peran beberapa tokoh yang berkiprah di NU dan PPP sekaligus.

Semangat NU untuk melangkah kembali pada Khittah 1926 di ikuti oleh GP Ansor pada Kongres VIII di Surabaya pada 19-24 April 1980. Ketua PBNU memberikan sambutan dalam Kongres tersebut ketika itu di Ketuai Oleh Yusuf Hasjim. Adam Malik mengapresiasi perkembangan Ansor yang mengikuti langkah NU dalam mengalokasikan sumber daya guna mengatasi problematika sosial, seperti lapangan kerja, kependudukan, lingkungan hidup, dan pendidikan dan dengan demikian menjauh dari kehidupan Politik. Dalam hasil Kongres VIII di surabaya terpilihlah Chalid Mawardi sebagai Ketua Umum GP Ansor, Chalid Mawardi menilai apabila GP Ansor hanya diam dalam perpolitikan Negara ini bisa menutup kemungkinan mempersempit ruang gerak GP Ansor. Hal ini

bertentangan dengan penilaian Adam Malik wakil Presiden ketika itu.. Chalid Mawardi sudah menunjukkan kecenderungan dalam memimpin Ansor untuk merapat ke sisi pemerintahan dan bersikap akomodatif terhadap kebijakan Orde Baru. Kecenderungan ini terlihat pada Konferensi Besar VII GP Ansor yang digelar di Semarang pada tanggal 3-6 September 1981. konferensi besar ini juga menyetujui Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” dan mencalonkan kembali menjadi Presiden Mandataris MPR periode 1982-1988. Keputusan akomodatif terhadap rezim Orde Baru di ambil dengan berbagai pertimbangan taktis. Tapi, hal ini mengundang kontroversi. Sebagaimana tercantum dalam mukadimah “Deklarasi Semarang” seperti *“agar seluruh jajaran pimpinan dan warga Gerakan Ansor dapat menggerakkan kembali roda Organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasinya kepada perjuangan demi Agama, Negara, dan Bangsa di masa depan”* dalam mukadimah tersebut sudah jelas bahwa tugas utama jajaran utama pengurus hasil kongres VIII adalah menggerakkan kembali. Tetapi Ansor yang selama 1970-an hampir mati suri. Bersama NU Organisasi-Organisasi Islam mendapat tekanan dari rezim Orde Baru. Oleh karena itu sikap yang di ambil Chalid Mawardi dalam akomodatif terhadap pemerintah pilihan strategi rasional demi menjaga keberlangsungan Organisasi.

B. Penerimaan Pancasila sebagai Asas Tunggal

Pasca muktamar ke-26, kembalinya NU dan GP Ansor ke Khittah 1926 baru terwujud gagasan belaka dan belum termanifestasikan dalam praktek berorganisasi, para Kiai menyadari adanya keperluan untuk menegaskan kembali pemulihan Khittah 1926 dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada bulan

Desember 1983. Pada momen ini, Kiai membahas Pancasila sebagai Asas tunggal. Hal ini sudah di sampaikan langsung oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin kepada Presiden Soeharto sebelum di adakannya Muktamar NU. Muktamar NU di Situbondo membahas Empat problematika yang nanti akan disahkan pada Muktamar ke- 27 di Situbondo. Ke empat permasalahan tersebut ialah

- a. Pemulihan NU kepada Khittah 1926
- b. Pemantapan pancasila sebagai asas tunggal
- c. Penegasan batasan penyaluran aspirasi politik NU melalui kekuatan sosial-politik yang ada
- d. Pembahasan masalah keagamaan NU

Dalam pembahasan pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila di liputi berbagai polemik salah satunya adalah relasi antara Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Islam. oleh sebab itu pada tanggal 16 Desember 1983 bertepatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara Presiden menegaskan *“Pemantapan Pancasila sebagai Asas Organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak untuk mengurangi arti dan peranan agama dalam kehidupan BangsaIndonesia. Sungguh tidak beralasan apabila masih ada diantara kita menganggap Pancasila sebagai ancaman terhadap agama. Pemikiran seperti itu harus dibuang jauh-jauh dan sama salahnya juga bila menganggap agama sebagai ancaman.”* Atas inisiatif Chalid Mawardi mengadakan pekan orientasi demi memperdalam P4, UUD 45, dan GBHN untuk meningkatkan kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pekan orientasi ini di ikuti oleh seluruh pimpinan dan pengurus wilayah GP Ansor. Kemudian pada Konfrensi Besar VIII pada bulan

lingkungan, lapangan pekerjaan adalah menjadi isu yang belum sepenuhnya dapat di selesaikan.

GP Ansor dalam hal ini pada era pasca Orde Baru hidup seperti keadaan di atas, terlebih seperti isu-isu Intoleransi, Radikalisme, dan terorisme. GP Ansor dengan pendiriannya yaitu mempertahankan NKRI dari berbagai paham ekstrem dan mempertahankan Ideologi Bangsa Indonesia dengan Pancasila. Dengan adanya sistem Demokrasi membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang menafsirkan sistem Demokrasi adalah kebebasan berideologi ekstrem yang memanfaatkan cela terjadi kerusuhan anatar kelompok di berbagai daerah di tanah air, selain itu krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kondisi seperti ini mendorong kelompok-kelompok ekstrim yaitu kelompok Islam Radikal untuk memperjuangkan kembali obsesi mereka dengan mengganti Ideologi Pancasila karena di anggap gagal dalam membawa ke arah yang lebih baik. Bagi pandangan mereka Islam adalah solusi dari segala masalah yang sudah ada. Dengan demikian, hal ini menjadi nostalgia bagi kelompok-kelompok Islam radikal ingin mendikiran Negara Islam dan Khilafahnya. Melalui Demokrasi dan globalisasi paham-paham radikal sangat cepat dan mudah tersebar. Kasus-kasus Intoleransi, Radikalisme, dan terorisme tentu saja berdampak pada NU dan GP Ansor yang mengusung Islam Moderat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini membuat reaksi kepada GP Ansor dengan beragam cara. Ancaman teror yang kerap terjadi di perayaan natal di setiap tahun membuat GP Ansor mengerahkan Bansernya demi melakukan penjagaan dan pengamanan di Gereja-gereja. Melibatkan Banser dalam kegiatan pengamanan di mulai pada tahun 1996 sejak

meletusnya kerusuhan di Situbondo. Menurut Nusron wahid, Gus dur sendiri yang memberikan instruksi memberikan pengamanan di gereja. pada tahun 2017, Ansor menurunkan sekitar 2 juta lebih personel Banser untuk mengamankan perayaan Natal. Yaqut Cholil Qoumas, ketua umum PP GP Ansor saat ini, mengatakan bahwa tradisi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang tengah merayakan perayaan Natal.

Dalam pengamanan perayaan Natal ini, pengorbanan nyata demi menjaga kerukunan antar umat beragama ditunjukkan oleh seorang anggota Banser yaitu Riyanto, pada tanggal 24 Desember 2000 di Gereja Eben Haezer, Mojokerto, Riyanto menjadi korban terkena ledakan Bom saat hendak mengamankan bungkusan plastik mencurigakan yang ia temukan di depan gereja. Tewasnya Riyanto menjadi peristiwa penting kiprah Ansor menjaga pentingnya persaudaraan di Indonesia.

